

	News Title : Bappebti Ingatkan Waspada Saat Bertransaksi PBK	
	Media Name : Validnews.id	Journalist : Sakti Wibawa
	Publish Date : 10 May 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Nursalam (Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI))	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Perdagangan Berjangka Komoditi

Beranda > Ekonomi > Berita ► Ekonomi 10 Mei 2023 12:02 WIB Bappebti Ingatkan Waspada Saat Bertransaksi PBK Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) kerap dijadikan kedok kejahatan investasi ilegal. Bappebti mendorong masyarakat mengenali modus operandi. Pemulis: Sakti Wibawa, Editor: Fia Haris  Didid Noordiatmoko, M.M., Kepala Bappebti <i>Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko memberi kuliah literasi PBK kepada media jala. Kementerian Perdagangan/Dik</i> JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi (PBK). Dia menilai, industri PBK di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan industri PBK sebagai kedok dalam melakukan kejahatan investasi ilegal. Hal ini pun menjadi tantangan terbesar yang dihadapi regulator saat ini. Karena itu, ia mendorong masyarakat pandai membedakan investasi PBK yang legal (berizin) dan tidak legal dengan mengenali modus operasinya. "Sebagai upaya kehati-hatian terhadap kejahatan yang berkedok PBK, masyarakat harus mengetahui beberapa modus yang sering dilakukan, seperti penipuan berkedok transaksi PBK, penjualan dengan dalih transaksi kontrak PBK, dan <i>money game</i> atau perdagangan dengan skema ponzi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/5) malam. Masyarakat dapat mengakses daftar perusahaan PBK yang berizin dari Bappebti dapat dilihat disitus web www.bappebti.go.id atau melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id. Baca Juga: Ponzi, Modus Penipuan Investasi Robot Trading Wahyu Kenzo Didid mengungkapkan, kegiatan ilegal berkedok PBK juga terjadi melalui penawaran paket-paket investasi menggunakan robot trading dengan skema ponzi. Kerugian yang terjadi dari modus investasi tersebut adalah pembayaran keuntungan kepada para anggota dari dananya sendiri dan dana dari anggota baru yang berhasil direkrut atau <i>member get member</i>. Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nursalam juga turut mengingatkan masyarakat agar tidak terjun bertransaksi PBK sebelum benar-benar memahami industri ini. Menurutnya, PBK sendiri bersifat <i>high risk high return</i>. Dengan kata lain, potensi keuntungan yang besar selalu diiringi dengan kemungkinan kerugian yang tidak kalah besar. "Kami terus berupaya mengencakan edukasi dan literasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok usaha dan dari kampus ke kampus. Memberikan layanan informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat dan sangat terbuka untuk berdiskusi," paparnya. Untuk mendukung masyarakat, Bappebti sendiri telah melaksanakan bulan literasi pada bulan April lalu. Pengalihan Kewenangan Dalam kesempatan itu, Didid menuturkan, perdagangan berjangka komoditi (PBK) relatif tidak terdampak pandemi covid-19 dan transaksinya stabil. "Peningkatan PBK perlu terus didorong agar mampu memberikan kontribusi pada pembangunan perekonomian di Indonesia. Karena untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, ekonomi dan perdagangan Indonesia diharapkan menjadi negara berpendapatan tinggi dan produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-5 dunia pada 2045," katanya. Dirinya melanjutkan, berbagai upaya maksimal perlu dilaksanakan dalam peningkatan daya saing ekspor serta inovasi teknologi sehingga Indonesia diperkirakan menjadi negara pengekspor terbesar ke-10 dunia dengan pangsa pasar 2% dari ekspor barang dan jasa dunia pada tahun 2045. Baca Juga: Serakah Berujung Masalah Dia juga mengingatkan adanya pengalihan kewenangan pengawasan perdagangan derivatif melalui sinergi antara Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Perdagangan berjangka memiliki risiko yang tinggi untuk mempengaruhi stabilitas keuangan. Secepatnya, akan dilakukan sinergi pengawasan terhadap perdagangan derivatif antara Bappebti dan OJK. Saat ini, sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah terkait hal tersebut," jelasnya.	
---	--